



Laporan Bulan Juli



2018

Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Meliputi Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum serta Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul Telp/faks. 0274-367348 Pos-el: surat@pn-bantul.go.id Situs: www. pn-bantul.go.id

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Pendahuluan	1
Pelaksanaan tugas	2
A. Kegiatan Administrasi Umum	
1. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	2
2. Bagian Umum dan Keuangan	4
3. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelapora	n6
B. Kegiatan Administrasi Teknis	
1. Penyelesaian Perkara	8
2. Data Perkara	12
3. Pelayanan Hukum	15
4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	15
Progres dan Pencapaian	18
A. Perkara 3 bulan terakhir	18
B. Pelayanan Hukum	21
C. Sarana dan Prasarana	21
D. Tata Laksana Organisasi	21
E. Realisasi Anggaran	21
F. Kegiatan Perencanaan dan Anggaran	21
Kesimpulan dan Saran	22

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini adalah uraian kegiatan pada Pengadilan Negeri Bantul secara umum yang disampaikan secara ringkas. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Sehingga diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga dapat diketahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bulan selanjutnya.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang sekretariatan terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan IT dan pelaporan. Serta pelaksanaan kegiatan bidang kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan hingga pada bulan Juli ini bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan kegiatan secara lancar dengan berbagai peningkatan baik pada penanganan perkara, administrasi perkara, pelayanan masyarakat, kegiatan pelaksanaan DIPA maupun kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti untuk kebersihan dan kerapihan kantor. Atas pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai harapan dan kendala-kendala yang dihadapi dapat dipecahkan bersama-sama.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk periode berikutnya.

Bab I **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Bantul dengan tingkatan kelas I B sejak tahun 2017. Kantor Pengadilan Negeri Bantul terletak di Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul dan berada tidak jauh dengan kompleks kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kepolisian Resor Bantul dan Kantor DPRD Kabupaten Bantul.

Laporan ini dibuat berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masing masing bidang kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam periode setiap satu bulan. Selain diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, laporan bulanan ini juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengadilan Negeri Bantul. Dengan adanya laporan ini diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan statistik pada Pengadilan Negeri Bantul secara ringkas sehingga Pengadilan Negeri Bantul sendiri dapat mengetahui fluktuasi hasil kerja pada setiap bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci masing-masing bidang telah kami laporkan sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor: KMA/080/SK/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lembaga Peradilan.

Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang administrasi umum yang meliputi pelaporan di bagian sekretariatan yang terdiri dari bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, bagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan TI dan pelaporan. Selanjutnya adalah laporan kegiatan bidang teknis yang menyajikan data-data pada bagian kepaniteraan, diantaranya adalah bagian perdata, bagian pidana dan bagian pelayanan hukum.

Bab II **PELAKSANAAN TUGAS**

Pada bab ini disampaikan rincian pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan pada Pengadilan Negeri Bantul, diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kegiatan administrasi teknis. Pengadministrasian umum meliputi bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sedangkan administrasi teknis terdiri atas kegiatan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum.

A. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM

1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Beberapa hal yang dapat disampaikan dari bagian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Statistik kepegawaian pada Pengadilan Negeri Bantul pada bulan Juli adalah:
 - Jumlah pegawai pada akhir bulan Juli sebanyak 56 orang.

2)	Apabila diperinci berdasarkan golongan	a	dalah	sebagai
	berikut:			
	1) Golongan IV	:	3	Orang
	2) Golongan III	:	49	Orang
	3) Golongan II	:	3	Orang
	4) Golongan I	:	1	Orang
3)	Mutasi jabatan Struktural	:	-	Orang
4)	Mutasi jabatan Fungsional	:	-	Orang
5)	Mutasi dari dalam keluar	:	-	Orang
6)	Mutasi dari luar ke dalam	:	-	Orang
7)	Mutasi dari calon pegawai negeri ke	:	-	Orang
	pegawai negeri			_
8)	Mutasi karena pensiun	:	-	Orang
9)	Mutasi dari pegawai honor ke CPNS	:	-	Orang
10)	Kenaikan Gaji berkala	:	-	Orang
11)	Pengusulan Kenaikan Pangkat	:	-	Orang
12)	Permohonan kartu pegawai telah selesai	:	-	Orang
13)	Permohonan kartu suami/istri telah selesai	:	-	Orang
14)	Permohonan satya lencana karya	:	-	Orang
15)	Jumlah pegawai yang terkena hukuman	:	-	Orang
	disiplin			
16)	Meninggal dunia	:	-	Orang
17)	Diklat / Tugas/ Dinas Luar			
	1) Golongan IV	:	2	Orang
	2) Golongan III	:	-	Orang
	3) Golongan II	:	-	Orang
	4) Golongan I	:	-	Orang
18)	Prediksi			9

1) Prediksi Kenaikan Pangkat Oktober Orang 2) Kenaikan Gaji Berkala Bulan Agustus Orang 3) Pensiun Orang

b. Pengorganisasian Pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1)	Hakim	:	11	Orang
2)	Panitera	:	1	Orang
3)	Sekretaris (merangkap KPA)	:	1	Orang
4)	Panitera Muda	:	3	Orang
5)	Panitera Pengganti	:	20	Orang
6)	Juru Sita	:	2	Orang
7)	Juru Sita Pengganti	:	3	Orang
8)	Kasubag	:	3	Orang
9)	Staf	:	12	Orang
10)	Pejabat Pembuat Komitmen	:	1	Orang
11)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	:	1	Orang
	(PBJ)			
12)	Pejabat Penandatanganan SPM	:	1	Orang
13)	Bendahara Penerimaan	:	1	Orang
14)	Bendahara Pengeluaran	:	1	Orang
15)	Arsiparis	:	-	Orang
16)	Pustakawan	:	-	Orang
17)	Pranata komputer	:	-	Orang
18)	Pegawai fungsional yang diperbantukan	:	16	Orang

Tata laksana Kepegawaian

Tata laksana kepegawaian adalah bagaimana pegawai dalam sistem ini bekerja. Salah satunya adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana setiap bidang dalam sistem ini berjalan.

No	Jenis SOP	Ada/tidak	Jumlah
		ada	
1.	SOP bidang Keperdataan	Ada	15
2.	SOP bidang Kepidanaan	Ada	15
3.	SOP Pelayanan Hukum	Ada	8
4.	SOP Layanan Informasi & pengaduan	Ada	2
5.	SOP tata persuratan	Ada	2
6.	SOP keperpustakaan	Ada	1
7.	SOP Tata laksana keuangan	Ada	9
8.	SOP Umum/tata laksana perkantoran	Ada	2
9.	SOP Pemeliharaan dan tata laksana Aset	Ada	5
10.	SOP tata laksana kepegawaian	Ada	9
11.	SOP tata laksana penganggaran	Ada	3
12.	SOP Teknologi Informasi	Ada	17
13.	SOP Pelaporan	Ada	3

Selain itu sebagai wujud kontrol atas sistem yang dijalankan di perlukan adanya Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mengatur lebih lanjut tata kerja yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut adalah SK (Surat Keputusan) yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Bantul selama bulan Juli 2018:

(tidak ada)

2 Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, pengelolaan keuangan.

Berikut adalah pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan bagian umum dan keuangan pada bulan Juli 2018:

1. Pengelolaan Keuangan

❖ DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400172/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 6.213.405.000 (enam milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus lima ribu rupiah). Dari dana tersebut digunakan untuk program Pembinaan Administrasi dan pengelolan Keuangan Badan urusan Administrasi (Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi hingga bulan Juli ini adalah sebesar 65,99%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 01 yang terjadi pada bulan Juli:

a) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosen- tase
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	38.736.000	0	2.500.000	6,45%
Layanan Perkantoran	5.997.669.000	852.422.079	4.097.846.728	68,32%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	177.000.000	0	0	0%
Total	6.213.405.000	852.422.079	4.100.346.728	65,99%

b) Penerimaan Negara

2)	Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	:	Rp.	551.300
3)	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	:	Rp.	109.848

❖ DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA dengan nomor DIPA-005.01.2.400173/2018 Pengadilan Negeri Bantul memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 139.640.000 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dari dana tersebut digunakan untuk program/kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri atas output Pos Bantuan Hukum; Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu; dan Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.

Penyerapan anggaran DIPA Badan Peradilan Umum hingga bulan Mei ini adalah sebesar 33,56%. berikut adalah informasi terkait penyerapan anggaran DIPA 03 yang terjadi pada bulan Mei:

a) Realisasi Belanja Program

Program	DIPA (Rp.)	Realisasi bln ini (Rp.)	Realisasi s/d bln ini (Rp.)	Prosen- tase
Pos Bantuan Hukum	31.200.000	0	3.600.000	11,54%
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	108.440.000	9.003.800	42.974.100	39,63%
Program Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	-	-	-
Total	139.640.000	9.003.800	46.874.100	33,56 %

b) Penerimaan Negara

	O			
1)	Pendapatan Surat Pengesahan Dibawah	:	Rp.	150.000
	Tangan			
2)	Pendapatan Uang Meja (Leges)	:	Rp.	123.000
3)	Pendapatan Ongkos Perkara	:	Rp.	440.000
4)	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	:	Rp.	657.600
	Total Penerimaan Negara		Rp.	1.370.600

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan persediaan Selama bulan Mei tidak terdapat transaksi BMN.

Nilai aset BMN pada neraca Badan Urusan Administrasi per 30 Juli adalah

Akun Neraca	Nilai (Rp)
Barang Konsumsi	8.515.400
Bahan Untuk Pemeliharaan	868.400
Tanah	11.109.426.000
Peralatan dan Mesin	2.335.436.209
Gedung dan Bangunan	5.663.510.000
Jalan dan Jembatan	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	48.152.062
KDP	0
Software	74.570.000
Aset tetap yang tidak digunakan dalam	58.921.000
operasional	
Akumulasi penyusutan	(2.730.270.170)
Jumlah	16.605.588.901

Nilai aset BMN pada neraca Badan Peradilan Umum per 30 Juli adalah

Akun Neraca	Nilai
Barang Konsumsi	1.460.730
Bahan Untuk Pemeliharaan	0
Akumulasi penyusutan	(0)
Jumlah	1.460.730

3. Tata Persuratan

a.	Jumlah surat masuk	:	252	Surat
b.	Jumlah surat keluar	:	224	Surat
c.	Jumlah surat masuk sampai dengan bulan Juli	:	1.525	Surat
d.	Jumlah surat keluar sampai dengan bulan Juli	:	2.090	Surat

3 Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kegiatan perencanaan, terutama perencanaan dalam hal anggaran tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan telah satu kali pada setiap periode satu Tahun Anggaran. Dalam proses perencanaan dilakukan beberapa penelaahan berkaitan dengan sinkronisasi anggaran antara Dipa satuan kerja dengan Dipa pusat. Dan dalam pelaksanaan Dipa sangat dimungkinkan adanya atau diperlukan adanya revisi terhadap DIPA maka sub bagian ini bertugas meyiapkan dokumen untuk revisi tersebut.

Selanjutnya, untuk kegiatan TI bertugas melakukan maintenance kelancaran jaringan komputer baik jaringan lokal maupun penglolaan jaringan internet untuk keperluan kegiatan komunikasi data instansi. Memastikan bahwa komunikasi data dalam jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian melakukan pengelolaan website meliputi upload berita dan memegang control panel website. Kegiatan pelaporan meliputi pelaporan bulanan, laporan tahunan, SAKIP serta pelaporan lain yang berhubungan dengan penganggaran dan teknologi informasi.

Perencanaan DIPA

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 6.213.405.000 DIPA Badan Peradilan Umum (03) 139.640.000

Revisi DIPA 01 bulan ini:

Tidak ada

Revisi DIPA 03 bulan ini:

- Tidak ada
- Teknologi Informasi

Internet Service Provider Indihome Bandwidth 100 Mbps Web hosting 20 GB 2 server Server

Server aplikasi dalam kondisi

Server data dalam kondisi baik

SIPP versi 3.2.0-3 SIPP Web versi 3.2.0-3

Maintenance hardware bulan ini:

- (tidak ada)

Mantenance jaringan komputer bulan ini:

- (tidak ada)

- Pelaporan c.
 - Laporan Bulanan terakhir Bulan Juli
 - Pelaporan lain:
 - o Tidak ada

B. KEGIATAN ADMINISTRASI TEKNIS

Kegiatan pada bidang teknis meliputi kegiatan penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara Pidana dan Perkara Perdata, serta kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat baik berupa informasi hukum, legalisasi/pengesahan, surat keterangan tertentu, bantuan hukum, maupun pengaduan hukum.

1. Penyelesaian Perkara Bulan Juli 2018

a. Prosentase penyelesaian perkara pidana

penyelesaian disajikan Prosentase perkara pidana dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang putus sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara pidana dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Penyelesaian perkara pidana biasa



Penyelesaian perkara pidana Anak



Penyelesaian perkara pidana singkat



Penyelesaian perkara pidana cepat



Penyelesaian perkara pidana lalu-lintas





Penyelesaian perkara pidana pra-peradilan

b. Prosentase penyelesaian perkara perdata

Prosentase penyelesaian perkara perdata disajikan dengan memperbandingkan sisa perkara bulan yang lalu ditambah jumlah perkara yang masuk pada bulan ini dengan jumlah perkara yang putus sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara perdata dalam satu periode bulanan.

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut:



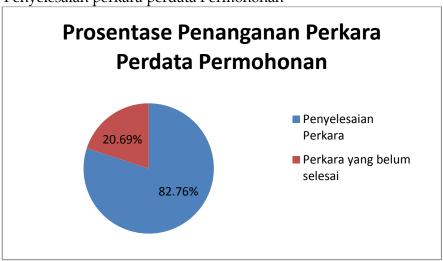
Penyelesaian perkara perdata Gugatan Sederhana



Penyelesaian perkara perdata Bantahan



Penyelesaian perkara perdata Permohonan



Perkara

Penyelesaian perkara perdata Eksekusi



2. Data Perkara bulan Juli 2018

a. Data perkara pidana

1) P e	rkara Pidana Biasa			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	61	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	21	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	34	Perkara
d)	Sisa bulan ini	:	48	Perkara

e) Sisa belum dibagi 2) Perkara Pidana Anak

a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
b)	Masuk bulan ini	:	6	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	1	Perkara
d)	Sisa bulan ini	:	5	Perkara
e)	Sisa belum dibagi	:	0	Perkara
f)	Perkara yang diselesaikan secara	:	0	Perkara
	diversi			

Perkara Pidana Singkat

	O			
a)	Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
b) Masuk bulan ini	:	1	Perkara
c)	Putus bulan ini	:	1	Perkara
d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
e)	Sisa belum dibagi	:	0	Perkara

4) Perkara Pidana Cepat

á	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
1	o) Masuk bulan ini	:	7	Perkara
(c) Putus bulan ini	:	7	Perkara
(d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
6	e) Sisa belum dibagi	:	0	Perkara

Perkara Pidana Lalu Lintas 5)

a) Sisa perkara bulan lalu 0 Perkara

	b) Masuk bulan ini		483	Perkara
	c) Putus bulan ini		483	
	d) Sisa bulan ini		0	
6)	Putusan pidana yang disampaikan		43	Perkara
٥,	kepada para pihak tepat waktu (tidak	•	10	1 CIRCIU
	terlambat)			
7)	Upaya Hukum Banding			
- /	a) Sisa perkara bulan lalu	:	1	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	1	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
8)	Úpaya Hukum Kasasi			
,	a) Sisa perkara bulan lalu	:	10	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	1	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	1	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	10	Perkara
9)	Upaya Hukum Grasi			
ŕ	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
10)	Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	0	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	0	Perkara
11)	Perkara Pra Peradilan			
	a) Sisa perkara bulan lalu	:	0	Perkara
	b) Masuk bulan ini	:	1	Perkara
	c) Putus bulan ini	:	0	Perkara
	d) Sisa bulan ini	:	1	Perkara
12)	Berkas Upaya hukum yang dikirim			
	secara lengkap dan tepat waktu			
	a) Banding	:	0	Perkara
	b) Kasasi	:	0	Perkara
	c) PK	:	0	
13)	Putusan Perkara yang Menarik	:	0	Perkara
	Perhatian masa			
	a) Perkara No.			
	 Putusan tanggal 	:		
	 Putusan di upload tanggal 	:		

b.	Data	perkara perdata			
	1)	Perkara Perdata G	ugatan		
		a) Sisa perkara bu	lan lalu	: 36	Perkara
		b) Masuk bulan in	i	: 3	B Perkara
		c) Putus bulan ini		: 5	Perkara
		d) Dicabut bulan i	ni	: 0) Perkara
		e) Belum dibagi		: 0) Perkara
		f) Sisa bulan ini		: 34	Perkara
	2)	Perkara Perdata G	•		
		a) Sisa perkara bu		: (
		b) Masuk bulan in	i	: (
		c) Putus bulan ini		: (
		d) Dicabut bulan i	ni	: (
		e) Belum dibagi		: (
	2)	f) Sisa bulan ini	. 1	: () Perkara
	3)	Perkara Perdata Ba		. 1	D1
		a) Sisa perkara bub) Masuk bulan in		: 1	
		,	1	: (
		c) Putus bulan inid) Dicabut bulan i	ni	: C	
		e) Belum dibagi	111		
		f) Sisa bulan ini		. c	
	4)	Perkara Perdata Pe	rmohonan	. 1	CIRAIA
	1)	a) Sisa perkara bu		: 8	B Perkara
		b) Masuk bulan in		: 21	
		c) Putus bulan ini		: 23	B Perkara
		d) Dicabut bulan i	ni	: 1	Perkara
		e) Sisa Belum Dib	agi	: 0	Perkara
		f) Sisa bulan ini		: 5	Perkara
	5)	Putusan perdata ya	nng disampaikan	: 28	B Perkara
		kepada para pihak	tepat waktu (tidak		
		terlambat)			
	6)	Perkara Perdata Ba	•		
		a) Sisa perkara bu		: 4	
		b) Masuk bulan in	i	: 1	
		c) Putus bulan ini		: 1	
		d) Dicabut bulan i	ni	: (
	_`	e) Sisa bulan ini		: 4	Perkara
	7)	Perkara Perdata Ka		1.0	N D 1
		a) Sisa perkara bu		: 10	
		b) Masuk bulan in		: (
		c) Putus bulan ini		: 1	
		d) Dicabut bulan ie) Sisa bulan ini	111	: (: 9	
	8)	Perkara Perdata Pe	niniauan Kombali	. 5	1 EIKara
	0)	a) Sisa perkara bu		: 2	Perkara
		b) Masuk bulan in		·	
		~, mount builtin	· -		CIRCIU

			,	Putus bulan ini	:	0	Perkara
			,	Dicabut bulan ini	:	0	Perkara
			,	Sisa bulan ini	:	2	Perkara
		9)		rkas Upaya hukum yang dikirim			
			sec	cara lengkap dan tepat waktu			
			a)	Banding	:	0	Perkara
			b)	Kasasi	:	0	Perkara
			c)	Peninjauan Kembali	:	0	Perkara
		10)	Pe	rkara Mediasi	:		
			a)	Jumlah perkara yang di mediasi	:	4	Perkara
			b)	Perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian	:	0	Perkara
		11)	Pe	rkara eksekusi			
)	a)		•	52	Perkara
			,	Masuk Bulan ini	:	1	Perkara
			,	Perkara ditidaklanjuti (eksekusi	•	0	Perkara
			c)	dilaksanakan)	•	O	Terrara
			d)	Dicabut	:	2	Perkara
			e)	Sisa bulan ini	:	51	Perkara
3.	Pela			ukum Bulan Juli 2018			
	a.		-	nan akta badan hukum			
		,		ılah pengesahan/pendirian		: (34
				ılah Perubahan anggaran dasar		:	4
		3)	Jum	ılah Pembubaran/likuidasi		:	0
	b.	Pela	ıyar	nan posbakum			
		1)	Jum	ılah kunjungan posbakum		:	4
		2)	Jum	ılah pelayanan posbakum		:	2 (penunjukan majelis hakim untuk pendampingan dalam perkara)
		3)	Jum	ılah petugas piket posbakum		:	7 Lembaga
	c.	-		pengaduan masyarakat yang diterima		:	0

4. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Berikut adalah status perkara yang tercatat pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) per 31 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Bantul.

STATUS DARI PERKARA GUGATAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Kesepakatan Mediasi	11	2	13
	Gugatan			
2	Perkara Yang Belum Putusan Gugatan	12	22	34
3	Perkara Yang Belum Minutasi Gugatan	-	3	3
4	Perkara Yang Belum Pemberitahuan	1	-	1
	Permohonan Banding Gugatan			
5	Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas	1	1	2
	Banding Gugatan			

(6	Perkara Yang Belum Putusan Banding Gugatan	3	1	4
	7	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi Gugatan	7	2	9

STATUS DARI PERKARA PERMOHONAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Permohonan	-	7	7
2	Perkara Yang Belum Minutasi Permohonan	-	2	2

STATUS DARI PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Minutasi	-	1	1
	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)			
2	Perkara Yang Belum Putusan Banding	-	1	1
	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)			
3	Perkara Yang Belum Putusan Kasasi	-	1	1
	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)			

STATUS DARI PERKARA PIDANA BIASA

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Penetapan Hari	-	1	1
	Sidang Pertama Pidana Biasa			
2	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Biasa	-	49	49
3	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Biasa	-	9	9

STATUS DARI PERKARA PIDANA ANAK

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana Anak	-	5	5
2	Perkara Yang Belum Minutasi Pidana Anak	-	1	1

STATUS DARI PERKARA PIDANA PRA PERADILAN

No	Status	Terlambat	Normal	Total
1	Perkara Yang Belum Putusan Pidana	-	1	1
	Praperadilan			

STATUS PENAHANAN

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Akan Habis Dalam Waktu Kurang Dari 7 Hari

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Perkara Pidana	3

Jumlah Terdakwa Yang Masa Penahanannya Telah Habis

No Jenis Perkara	Jumlah
Tidak Ada Data	

STATUS JURNAL KEUANGAN PERDATA

Jumlah Sisa Panjar Perkara Yang Belum Dikembalikan

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK
1	Gugatan	36	31	16	-
2	Permohonan	12	-	-	-
3	Perlawanan/Bantahan	2	1	-	-
	(derden verzet)				

Jumlah Panjar Perkara Yang Hampir Habis (Kurang dari Rp. 100.000,-)

No	Jenis Perkara	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Tingkat PK
1	Permohonan	1			

BAB III PROGRESS DAN PENCAPAIAN

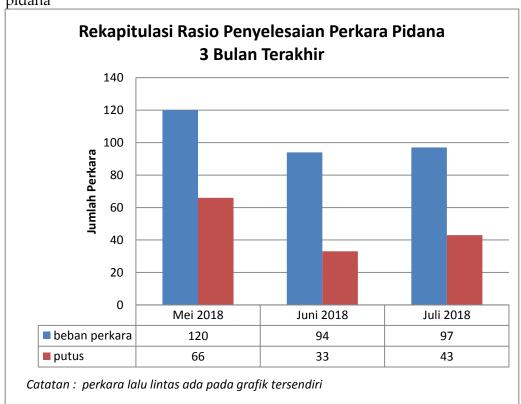
Bagian ini menyampaikan beberapa pencapaian atau kegiatan yang dilakukan selama bulan Juli tahun 2018 pada masing masing bidang. Penyampaian progress perkembangan disajikan dengan membandingkan data pada tiga bulan terakhir. Beberapa progres yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul pada bulan ini adalah

A. Progres Penyelesaian perkara 3 bulan terakhir

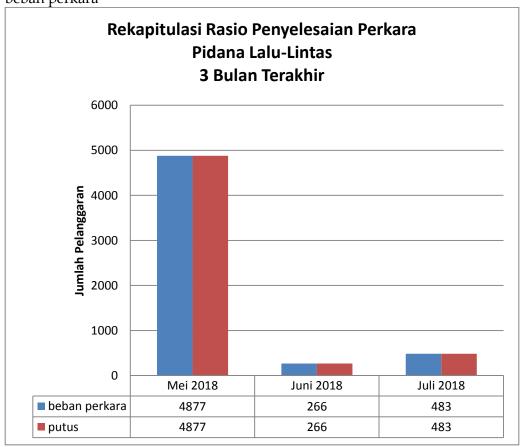
1. Penyelesaian perkara pidana

Bulan		Jenis Perkara						
		Pidan a Biasa	Pidan a Anak	Pidana Singka t	Pidan a Cepat	Pidana Lalu- Lintas	Pidana Pra Peradilan	
Mei	Sisa awal	48	3	1	0	0	0	
2018	Masuk	33	0	1	34	4877	0	
	Putus	29	2	1	34	4877	0	
	Sisa akhir	52	1	1	0	0	0	
Juni	Sisa awal	52	1	1	0	0	0	
2018	Masuk	23	0	0	17	266	0	
	Putus	14	1	1	17	266	0	
	Sisa akhir	61	0	0	0	0	0	
Juli	Sisa awal	61	0	0	0	0	0	
2018	Masuk	21	6	1	7	483	1	
	Putus	34	1	1	7	483	0	
	Sisa akhir	48	5	0	0	0	1	

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana terhadap beban perkara pidana



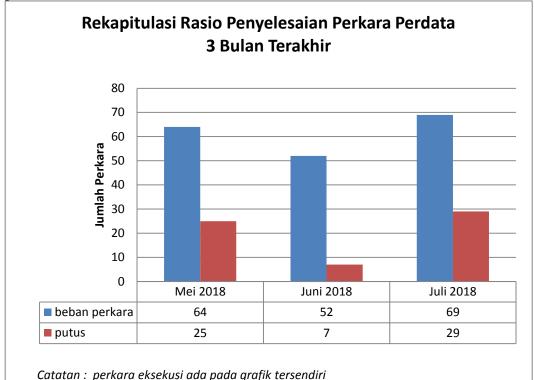
Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara pidana lalu-lintas terhadap beban perkara



2. Penyelesaian perkara perdata

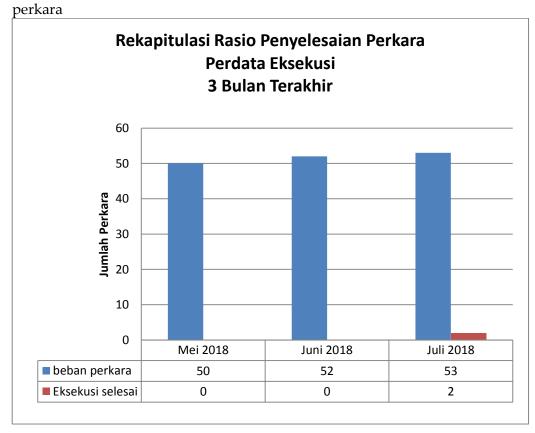
Bulan		Jenis Perkara					
		Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Perdata Bantahan	Perdata Permo- honan	Perdata Eksekusi	
Mei 2018	Sisa awal	29	0	3	13	48	
	Masuk	7	0	0	12	2	
	Putus	3	0	2	20	0	
	Sisa akhir	33	0	1	5	50	
Juni 2018	Sisa awal	33	0	1	5	50	
	Masuk	6	0	0	7	2	
	Putus	3	0	0	4	0	
	Sisa akhir	36	0	1	8	52	
Juli 2018	Sisa awal	36	0	1	8	52	
	Masuk	3	0	0	21	1	
	Putus	5	0	0	24	2	
	Sisa akhir	34	0	1	5	51	

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata terhadap beban perkara perdata Rekapitulasi Rasio Penyelesaian Perkara Perdata



Catatan: perkara eksekusi ada pada grafik tersendiri

Grafik rekapitulasi rasio penyelesaian perkara perdata eksekusi terhadap beban



B. Pelayanan

- 1. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
 - Kegiatan pelayanan Perdata, Pidana, dan pelayanan Hukum serta Penerimaan Surat melalui meja PTSP telah berjalan semakin baik. Masih perlu ditingkatkan.

2. Persidangan

Pelayanan laporan sidang diterima di meja informasi atau di meja PTSP.

C. Sarana dan prasarana

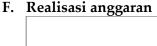
- Telah dilakukan perbaikan terhadap Kamar Mandi mushola di lantai 2 gedung arsip yang mengalami kebocoran lantai dan saluran pembuangan hingga membuat tembok lembab parah di lantai satu. Dilakukan penggantian keramik dan lapisan supaya tidak rembes.
- Dilakukan perbaikan terhadap rumah dinas KPN berupa kebocoran atap.

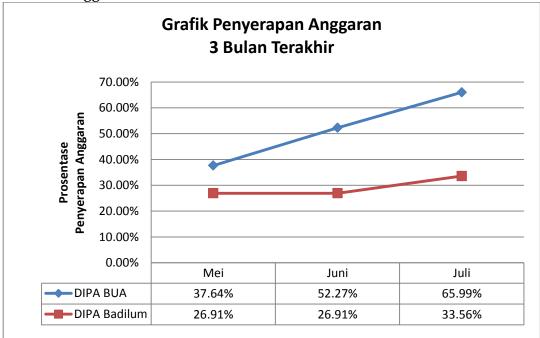
D. Kepegawaian dan Tata Laksana Organisasi

- Tata Laksana Organisasi sudah berjalan dengan baik.
- Dilakukan pembenahan terhadap file kepegawaian berupa pemberian label pada file box arsip kepegawaian.

E. SIPP

Terdapat temuan pada SIPP pada bagian penahanan terdakwa. Belum adanya opsi lepas tahanan demi hukum.





G. Kegiatan perencanaan dan anggaran

Terkait perencanaan, PN Bantul mengikuti kegiatan Sosialisasi Reviu SAKP oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 24 Juli 2018. Dari kegiatan tersebut bahwa akan ada reviu terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan disusun oleh Makhamah Agung untuk kemudian disebarkan ke pengadilan di bawahnya.

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan laporan kegiatan baik teknis maupun administrasi umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada umumnya semua pelaksanaan kegiatan ada Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan namun masih perlu peningkatan performa pada masing masing bidang.
- Dengan volume pekerjaan yang cukup banyak, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan personil tenaga untuk ditempatkan di bidang administrasi, baik administrasi di sekretariatan maupun di kepaniteraan.

2. Saran

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi adalah:

- Untuk kesekretariatan dengan beban pekerjaan yang semakin berat belum diiringi adanya penambahan kualitas ataupun kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk membagi adil pekerjaan yang ada
- Di kepaniteraan juga mengalami hal yang sama yaitu kekurangan staf pelaksana, akan tetapi dapat diatasi dengan memperbantukan tenaga teknis Penitera Pengganti untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana disamping tugas fungsionalnya.
- Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan untuk masyarakat. Dengan menggunakan sarana yang ada diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan masyarakat merasa terlayani dengan puas oleh kualitas pelayanan pengadilan.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa saran yang dapat dilakukan adalah:

- Untuk mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia perlu dilakukan pembinaan baik secara internal maupun dorongan dari pengawas untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin serta dilakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Untuk sarana yang terbatas, dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan/perawatan atas sarana tersebut untuk memperbaiki fungsi maupun estetika sehingga layak digunakan.

Bantul, 13 Agustus 2018 Plh Panitera,

Sigit Indriyatno, S.H., M.H. NIP. 197404151994031001

Sekretaris.

Wiratno, S. H. NIP. 197202131993031002